

Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Ilmu Berparadigma Islam dalam Ekselerasi Pencapaian Visi dan Misi Konversi IAIN SUSQA Pekanbaru ke UIN SUSKA Riau (Penelitian Kebijakan dan Pengembangan)

Oleh: Amri Darwis¹

Abstract

The Implementation Model of Islamic Science Development Policy Paradigm in the Achievement of Acceleration Vision and Mission of Conversion IAIN to UIN SUSKA Riau (Research and Development Policy)

This article is the result of research evaluation Science Development policies Islamic paradigm. Islamic science development policy paradigm is the main mission of the college conversion to Islam original status of the State Islamic Institute into the State Islamic University (UIN) of Suska Riau. Because the image is viewed of the State Islamic Institute still stuck on the dichotomy of science, even focusing on the religious sciences only by ignoring the science world. Then proposed a new mission " Integrating Science with Islam ". This paper is the result of policy research by looking at the problems in the field, in particular the implementation of the development policy paradigm of Islamic science as the main mission of conversion of the State Islamic Institute to State Islamic University of Suska Riau is still lagging behind other elements of progress very quickly. This is a form of policy research model development research. Having analyzed various models of policy implementation, in accordance with the method of policy implementation model development research conducted the trials in the Faculty of Education and Teaching, and Faculty of Economics and Social Sciences. The result, some of the models that were developed as a model top down, Buttom Up, and Hybridge, Hybridge models is considered more effective and efficient to implement. While the main obstacle of the interviews were conducted in the presence of the faculty is not yet a model, a guide, or guide the development of science in the Islamic paradigm faculty in general and religious faculty.

Keywords: Model, implementation, and integration

Pendahuluan

Lembaga Pendidikan Tinggi Negeri yang mengawali konversi di Indonesia adalah Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi universitas, seperti IKIP Jakarta menjadi UNJ, IKIP Padang menjadi UNP, dan sebagainya. Selanjutnya menyusul Institut Agama Islam Negeri (IAIN) menjadi Universitas Islam Negeri (UIN). Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim (UIN Suska Riau) merupakan konversi dari Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim (IAIN Susqa Pekanbaru) telah memperoleh legalitas formal dari pemerintah sejak tanggal 4 Januari 2005 berupa Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2005 tentang perubahan status dari IAIN menjadi UIN (Amir Luthfi, 2005: 3). Dampak utama konversi ini berpengaruh terhadap jumlah mahasiswa melonjak naik dari 3.000 orang sebelum UIN menjadi 10.036 orang pada tahun 2006/2007 (M. Nazir, 2007: 2). Demikian pula tenaga dosen semula

195 orang meningkat menjadi 318 orang (M. Nazir, 2007: 2).

Rencana perubahan status dari IAIN ke UIN sebenarnya telah dimulai melalui Rapat Senat Institut tanggal 9 September 1998, yang menetapkan perubahan status IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau yang dilakukan secara bertahap. Mulai pada tahun akademik 1998/1999 telah dibuka beberapa jurusan atau program studi umum seperti Jurusan Psikologi pada Fakultas Tarbiyah, Jurusan Manajemen dan Manajemen Perusahaan pada Fakultas Syari'ah, dan Jurusan Ilmu Komunikasi pada Fakultas Dakwah (M. Nazir, 2004: 2).

Tahun akademi 2001/2002, UIN Suska telah memiliki 8 Fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum, Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial, Fakultas Sain dan

Teknologi, serta Fakultas Peternakan dan Pertanian (M. Nazir, 2004: 2).

Untuk memformulasikan keinginan perubahan status menjadi UIN tersebut dirumuskan pula visi dan misi UIN Suska sebagai berikut; Visi: "Menjadikan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau sebagai lembaga utama pendidikan tinggi yang mengembangkan IPTEK dan ajaran Islam secara integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013". Misi; Membentuk sumberdaya manusia berkualitas yang mampu memajukan ilmu yang integral dengan Islam secara akademik dan profesional serta mampu memberikan pelayanan prima kepada masyarakat" (M. Nazir, 2004: 4).

Misi utama pengembangan kajian ilmu, teknologi dan seni berparadigma Islam yang belum tampak secara signifikan sementara waktu yang ditargetkan tahun 2013 telah dekat. Inilah yang ingin ditelusuri dengan karya ilmiah yang berjudul "Model Implementasi Kebijakan Pengembangan Ilmu Berparadigma Islami Dalam Rangka Pencapaian Visi Dan Misi Konversi Iain Susqa Peanbaru Ke UIN Suska Riau".

Paradigma Integrasi Ilmu Dengan Islam

Kajian Historis Paradigma Pengembangan Ilmu Islami

1. *Paradigma Dualisme*

Hampir dua abad gerakan pembaharuan Islam digulirkan, hasilnya belum dapat mengantarkan umat Islam keluar dari problem keterbelakangan, kemiskinan, dan kebodohan. Kelemahan dan hancurnya sistem pendidikan di dunia Islam menjadi faktor dominan yang menyebabkan sulitnya umat Islam bangkit dari keterpurukan, apalagi untuk bisa *leading* bagi peradaban dunia. Selain rendahnya etos keilmuan, rendahnya etos kerja kaum Muslimin, dikotomi ilmu, dan penerapan dualisme sistem pendidikan di dunia Islam mempunyai andil besar memperburuk kinerja pengembangan mutu sumberdaya umat Islam (Al-Assad, 1994: 23).

Akar masalah yang menyebabkan dualisme sistem pendidikan di dunia Islam terletak pada penyerapan dan penerapan pandangan Barat sekuler oleh ilmuwan Muslim mengenai konsep dikotomi ilmu yang secara frontal mempertentangkan antara apa yang disebut orang dengan ilmu-ilmu agama dan

ilmu-ilmu sekuler. Pandangan yang mendikotomikan ilmu itu harus dilenyapkan, kemudian diganti dengan pandangan yang menyakini pentingnya kesatuan ilmu pengetahuan (*the unity of knowledge*) (Al-Faruqi, 1982).

Pandangan dikotomi selama ini memperlihatkan pemilahan yang beragam antara apa yang disebut ilmu-ilmu agama dan ilmu sekuler rasional. Fenomena pemahaman seperti itu tidak kurang pula dianut oleh sebagian ilmuwan-ilmuwan Timur, termasuk di Indonesia yang nota-bene beragama Islam. Hal ini wajar terjadi karena disebabkan berbagai faktor, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Faktor internal misalnya, berkaitan dengan pemahaman ulama Islam itu sendiri yang sejak abad pertengahan (dimulai sejak abad ke-12 M) telah melegalisir bentuk dikotomi ilmu, yaitu ilmu "agama" dan ilmu "umum," namun pada saat itu belum melenyapkan arti penting ilmu-ilmu rasional. Tetapi karena penekanan yang berlebihan kepada ilmu agama dan hampir saja menyepikan ilmu-ilmu rasional, telah menyeret umat Islam secara keseluruhan kepada pandangan yang cenderung mengabaikan ilmu-ilmu rasional dan intelektual. Fatwa Ulama tentang menuntut ilmu agama merupakan *fardu 'ain* dan menuntut ilmu rasional itu hanya *fardu kifayah*, bahkan muncul anggapan bahwa ilmu agamalah yang dapat menyelamatkan orang-orang Islam, dan ilmu-ilmu rasional itu tidaklah menjadi penting. Bahkan ilmu-ilmu rasional adalah ilmu-ilmu kafir, dan tidak ada dasarnya dalam Islam (Al-Assad, 1994: 23).

2. *Paradigma Integrasi*

Melihat perkembangan dikotomi di atas, Ibnu Khaldun seperti yang dikutip Nassaruddin, mengungkapkan bahwa ilmu di kalangan umat Islam dapat dilihat dari dua sisi. *Pertama*, sisi *naqli*, yaitu ilmu yang bersumber kepada wahyu (*al Qur'an dan Sunnah*). *Kedua*, sisi *ra'yi*, yaitu ilmu yang dikembangkan oleh akal manusia melalui nalar.

Transfer ilmu pengetahuan rasional seperti kedokteran, logika, dan matematika pada masa Abbasiyah dapat dikatakan hal yang baru. Oleh karena itu, ilmu tersebut masih dalam fase pengembangan awal pada masa itu. Tetapi kemudian, kedua macam ilmu (*naqliyah* dan *aqliyah*) mengalami percepatan pengembangan di tangan para ilmuwan dan ulama yang datang silih berganti. Suatu hal yang penting untuk dicatat, adalah bahwa kedua bidang ilmu itu mengkrystal dalam suatu model pengembangan ilmu

yang bersifat integratif, dengan tetap mempertahankan ciri-ciri metode dan sumber yang berbeda.

Al-Qur'an ternyata membawa konsep ilmu pengetahuan yang komprehensif dan berbeda dengan konsep ilmu pengetahuan yang dibawa oleh epistemologi yang lain. Misalnya, tentang asumsi dasar yang menjadi prinsip dalam kajian ilmiah, tentang cara atau jalan memperoleh ilmu pengetahuan, tentang objek ilmu pengetahuan, dan mengenai tujuan memperoleh ilmu pengetahuan.

Akan tetapi kenyataan historis menunjukkan bahwa umat Islam beberapa abad terakhir ini justru terjebak dalam persepsi dan konsepsi yang salah, lantaran memisahkan antara apa yang disebut dengan ilmu-ilmu "umum" dan ilmu-ilmu "agama". Persepsi dan konsepsi ini menjadi akar bagi tumbuhnya kembali dikotomi ilmu yang kemudian menciptakan dualisme pendidikan di dunia Islam yang sampai sekarang masih dirasakan dan diterapkan.

3. Misi Integrasi Ilmu dengan Islam

Secara empiris lembaga pendidikan tinggi Islam seperti IAIN semakin kurang diminati masyarakat karena membatasi atau mendikotomi ilmu umum dan ilmu agama. Maka melalui suatu proses yang sistematis, muncul gagasan sampai kepada implementasi ide yang diwujudkan dengan penyusunan proposal konversi IAIN Susqa Pekanbaru ke UIN Suska Riau. Sejak tahun 2000 diajukan proposal konversi dengan visi dan misi integrasi ilmu dengan Islam sebagai mana disebutkan di muka (Statuta UIN Suska BAB III Pasal 6 dan 7).

Melalui melalui beberapa kali seminar, dialog ulama dan cendekiawan Riau merumuskan perlu pengembangan fakultas baru (terintegrasi) di IAIN Susqa, akhirnya terbitlah Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2005 ditetapkan Perubahan Institut Agama Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Pekanbaru menjadi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Pasal 3 menyebutkan; (1) Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau mempunyai tugas utama menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu agama Islam. (2) Selain menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu Agama Islam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dapat menyelenggarakan program pendidikan tinggi bidang ilmu umum yang penyelenggaraannya dilakukan untuk mendukung

program pendidikan tinggi bidang ilmu Agama Islam yang diselenggarakan.

Penelitian ini akan lebih banyak mengali rencana strategis pengembangan ilmu berparadigma Islami sebagai visi dan misi utama konversi IAIN ke UIN Suska Riau.

Model Implementasi Kebijakan

1. Pengertian Implementasi Kebijakan

Kamus Webster merumuskan secara pendek bahwa *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); *to give practical effect to* (menimbulkan dampak atau akibat terhadap sesuatu). Jadi implementasi kebijakan dapat dipandang sebagai suatu proses melaksanakan keputusan kebijakan (biasanya dalam bentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan peradilan, perintah eksekutif atau dekrit presiden). Van Horn dan Van Meter, seperti dikutip Abdul Wahab (1997: 65), merumuskan proses implementasi sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu, pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Jika kebijakan dipandang sebagai suatu proses, maka pusat perhatian akan tertuju pada siklus kebijakan itu, yang pada umumnya meliputi formulasi, implementasi dan evaluasi kebijakan (Parsons, 1997: 543). Kebijakan yang telah diformulasikan dan dirumuskan bermaksud untuk mencapai tujuan tertentu. Dalam konteks ini dapat dimengerti seketika Linebery berpendapat bahwa kebijakan tidak akan sukses, jika dalam pelaksanaannya tidak ada kaitannya dengan tujuan yang akan dicapai (Linebery, 1978: 70).

Kebanyakan peneliti sering beranggapan bahwa setelah kebijakan disahkan oleh pihak yang berwenang, dengan sendirinya kebijakan itu akan dapat dilaksanakan, dan hasilnya akan mendekati seperti yang diharapkan oleh pembuat kebijakan tersebut. Padahal sebenarnya, menurut Islam sifat kebijakan itu kompleks dan saling tergantung, sehingga hanya sedikit kebijakan negara yang bersifat self-executing, yaitu setelah dirumuskan kebijakan itu dengan sendirinya dapat diimplementasikan. Yang paling banyak adalah yang bersifat non self-executing artinya

kebijakan negara perlu diwujudkan dan dilaksanakan oleh berbagai pihak sehingga mempunyai dampak yang diharapkan (M. Irfan Islamy, 1997: 106).

Pressman dan Wildavsky, seperti dikutip Abdul Wahab (1997: 65), juga mengingatkan bahwa proses implementasi kebijakan perlu mendapat perhatian yang seksama. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa salah jika ada yang beranggapan bahwa proses implementasi kebijakan dengan sendirinya akan berlangsung tanpa hambatan. Selain itu masih dalam pandangan Wahab mengatakan dengan jelas bahwa: *“the execution of policies is as important if not more important than policy-making. Policies will remain dreams or blue prints file jackets unless they are implemented”* (Abdul Wahab, 1997: 65).

Jadi rumusan kebijakan yang dibuat tidak akan mempunyai arti apa-apa atau hanya akan merupakan rangkaian kata-kata yang indah dan baku yang tersimpan rapi dalam sebuah dokumen kalau tidak diimplementasikan. Oleh karena itu implementasi kebijakan perlu dilakukan secara arief bersifat situasional, mengacu pada semangat kompetensi dan berwawasan pemberdayaan (Wahab, 1999: 36). Pressman dan Wildavsky, seperti dikutip Parsons (1997: 464) juga menegaskan supaya implementasi kebijakan itu betul-betul merupakan suatu proses interaksi antara *setting* tujuan dengan tindakan untuk mencapai dampak yang diinginkan. Masih terkait dengan konsep dan pengertian implementasi, Linebery (1978: 70) juga mengatakan bahwa proses implementasi setidaknya-tidaknya memiliki elemen-elemen sebagai berikut: 1) pembentukan unit organisasi baru dan pelaksana; 2) penjabaran tujuan kedalam berbagai sumber dan pengeluaran kepada kelompok sasaran; 3) pembagian tugas di dalam dan diantara dinas-dinas atau badan pelaksana; dan 4) pengalokasian sumber-sumber untuk mencapai tujuan.

Salah satu komponen utama yang ditonjolkan oleh Linebery (1978: 70) yaitu pengambilan kebijakan tidaklah berakhir suatu ketika kebijakan dikemukakan atau diusulkan, tetapi merupakan kontinuitas dan pembuat kebijakan. Ketika kebijakan selesai dirumuskan maka proses implementasi dimulai dengan cara-cara lain. Namun, umumnya hal tersebut cenderung mengandung dikotomi politik dan administrasi, dimana politik (legislatif) merumuskan kebijakan, sedangkan administratif sebagai pelaksananya. Perbedaan tersebut saat ini hanyalah

mitos belaka, sebab apa yang terjadi pada hakekatnya adalah peningkatan delegasi implementasi kekuasaan kepada agen-agen administrasi. Jadi, sebutan administrasi bukanlah garis besar dan perencanaan yang akan dilakukan, tapi terletak pada perencanaan terperinci dan rencana tersebut.

Anderson (1979: 92-93) mengemukakan bahwa implementasi kebijakan dapat dilihat dari empat aspek yaitu: *“who is involved in policy implementation, the nature of administrative proses, compliance with policy, and the effect of implementation on policy content and impact”* (siapa yang mengimplementasikan kebijakan, hakekat dan proses administrasi, kepatuhan(kompliansi) kepada kebijakan, dan efek atau dampak dari implementasi kebijakan). Keempat aspek tersebut menurut Anderson juga merupakan suatu rangkaian yang tidak terputus, dimana kebijakan dibuat ketika dilakukan administrasi dan diadministrasikan ketika dibuat Anderson (1979: 98). Setiap kebijakan yang telah ditetapkan pada saat akan diimplementasikan selalu didahului oleh penentuan unit pelaksana (governmental units), yaitu jajaran birokrasi publik mulai dari level atas sampai level birokrasi yang paling rendah.

Sesuai dengan pengertian dari implementasi kebijakan sebagai mana tersebut di atas, maka penelitian ini menyorot mengenai model implementasi kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami dalam rangka pencapaian misi integrasi ilmu dalam konversi IAIN ke UIN Suska Riau.

2. Model-model Implementasi Kebijakan

Parsons (1997: 463) membagi garis besar model implementasi kebijakan menjadi empat yaitu: 1) *The Analysis of failure* (model analisis kegagalan); 2) Model Rasional (*top down*) untuk mengidentifikasi faktor-faktor mana yang membuat implementasi sukses; 3) *Model Bottom-up*, kritikan terhadap model pendekatan top-down dalam kaitannya dengan pentingnya faktor-faktor lain dan interaksi organisasi; dan 4) Teori-teori basil sintesis (*hybrid theories*).

Metodologi

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengembangkan model dengan menganalisis; (1) model implementasi kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami sesuai dengan direncanakan di tingkat fakultas dengan jelas sesuai dengan visi, misi konversi IAIN ke UIN Suska, (2) model implementasi

kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami yang telah dilaksanakan di tingkat fakultas, (3) Apakah hasil kebijakan-kebijakan di tingkat fakultas telah sesuai dengan visi, misi, dan rencana strategis konversi IAIN ke UIN Suska Riau, Apakah acuan pengembangan model di tingkat fakultas telah dipahami oleh pelaksana kebijakan, (4) efektivitas model implementasi kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami di tingkat fakultas.

Penelitian ini dimulai dengan setting lokasi dimulai dari Fakultas Tarbiyah dan Keguruan (tertua) selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (baru). Sesuai dengan bentuk penelitian kebijakan, maka pengambil kebijakan dilibatkan dalam setting penelitian. Maka langkah awal setting di FTK melakukan pendekatan dengan dekan dan pembantu dekan I merumuskan rencana penelitian serta langkah-langkah pengembangan pengintegrasian ilmu dalam deskripsi matakuliah.

Selanjutnya prosedur penelitian pengembangan model ini melakukan pertemuan dengan para dosen untuk menggali data primer melalui penyusunan deskripsi matakuliah. *Sharing* dilakukan dengan memberikan panduan penyusunan deskripsi matakuliah. Panduan penyusunan deskripsi terdiri dari:

- a. Pedoman pengintegrasian ilmu ke dalam deskripsi mata kuliah.
- b. Contoh pengintegrasian ilmu ke dalam deskripsi mata kuliah umum.
- c. Blanko format sillabus, deskripsi matakuliah, dan SAP.

Sesuai tahapan penelitian yang akan dilakukan melalui *focus group discussion* (FGD). Kegiatan ini dilakukan melalui workshop dan menyusun deskripsi mata kuliah serumpun FGD.

Selanjutnya di Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Peneliti juga konsultasi dengan pengambil kebijakan dilibatkan dalam setting penelitian. Maka langkah awal melakukan pendekatan dengan Dekan dan Pembantu Dekan I Fekonsos merumuskan rencana penelitian serta langkah-langkah pengembangan pengintegrasian ilmu dalam deskripsi mata kuliah.

Selanjutnya melalui Dekan Fekonsos membuat surat permintaan penyusunan sillabus, deskripsi mata kuliah, dan SAP kepada para dosen Fekonsos. Penelitian dokumentasi ini digunakan untuk

menggali data primer melalui penyusunan deskripsi matakuliah. *Sharing* dilakukan dengan memberikan panduan penyusunan deskripsi matakuliah. Panduan penyusunan deskripsi terdiri dari:

- a. Pedoman pengintegrasian ilmu ke dalam deskripsi mata kuliah.
- b. Contoh pengintegrasian ilmu ke dalam deskripsi mata kuliah umum.
- c. Blanko format sillabus, deskripsi matakuliah, dan SAP.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian pengembangan model, yakni penelitian pengembangan model implementasi kebijakan ilmu berparadigma Islami. Menurut Matland (1995: 527) penelitian tentang implementasi kebijakan adalah penelitian tentang bagaimana suatu kebijakan diterapkan. Penelitian ini mengacu kepada upaya perbaikan sebuah kebijakan. Analisis yang berkaitan dengan perbaikan proses kebijakan mencakup analisis untuk perbaikan, implementasi, dan lingkungan kebijakan. Maka metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kebijakan (*Policy research*) berbentuk evaluasi kebijakan (Noeng Muhadjir, 2004: 36-40). Dalam analisis kebijakan, prosedur analitik berhubungan dengan empat metode, yaitu (a) pemantauan, (b) peramalan, (c) penilaian, dan (d) pemberian rekomendasi. Di samping itu, ada dua metode yang tidak dapat digolongkan ke dalam empat metode itu, yaitu: (a) penstrukturan masalah (problem structuring), yaitu suatu fase dalam proses analisis di mana analisis mulai merasakan adanya sesuatu yang "menggangu" situasi atau suasana, dan (b) inferensi praktis, yaitu pengambilan keputusan tentang sampai seberapa jauh masalah kebijakan itu telah dipecahkan (Soetjipto, 1987: 22).

Selain itu, untuk menjawab berbagai persoalan yang terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan program studi baru dalam rangka pencapaian visi, misi dan rencana strategis UIN Suska Riau, penelitian ini juga dirancang dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif lebih mengarah kepada pendekatan fenomenologi dan etnografi, digunakan untuk mempelajari, mengungkap dan memberikan (mendeskripsikan) serta menganalisis secara kritis fenomena yang ada dalam komunitas UIN Suska Riau khususnya yang terkait dengan formulasi dan implementasi kebijakan pengembangan program

pembukaan fakultas-fakultas baru. Uraian tentang berbagai metode yang digunakan dalam evaluasi tersebut merupakan metodologi penelitian kebijakan dengan karakteristiknya (Suharsimi Arikunto, 1998: 28). Evaluasi program-program yang sedang dilakukan, dinilai dan diprediksikan apakah renstra, misi dan visi konversi UIN Suska Riau bisa tercapai pada tahun 2013.

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti menangkap keadaan yang sebenarnya dari objek yang akan diteliti. Dalam penentuan lokasi, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan oleh peneliti, yakni: (1) merujuk pada teori substantif yang mendukung penelitian; (2) kondisi wilayah penelitian; dan (3) keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga dalam melakukan penelitian (Lexy J. Moleong, 2004: 86).

Berdasar acuan tersebut di atas, maka penelitian ini mengambil lokasi di kampus UIN Suska Riau, yakni kampus Raja Ali Haji Jalan HR. Soebrantas Panam Kecamatan Tampan. Waktu penelitian selama 2 (dua) bulan, yakni bulan Juli - Agustus 2011.

Subjek penelitian adalah dosen pengampu mata kuliah keislaman dan umum UIN Suska untuk penelitian ini dikembangkan di dua fakultas, yakni Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, serta Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial. Adapun objek penelitian kemampuan dosen mengembangkan ilmu berparadigma Islami (pengintegrasian) dalam deskripsi mata kuliah yang diampu, dokumen kurikulum, silabus, dan satuan acara perkuliahan (SAP), buku dasar, serta dokumen terkait lainnya.

Teknik pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan dokumentasi, observasi, dan wawancara terstruktur. Sumber data utama dalam penelitian ini ialah kata-kata, tindakan-tindakan, serta data tambahan seperti dokumentasi dan lain-lain. Sumber data adalah informan serta kegiatan yang bisa diamati dari dokumen. Informan dibedakan menjadi pelaku utama dan bukan pelaku utama.

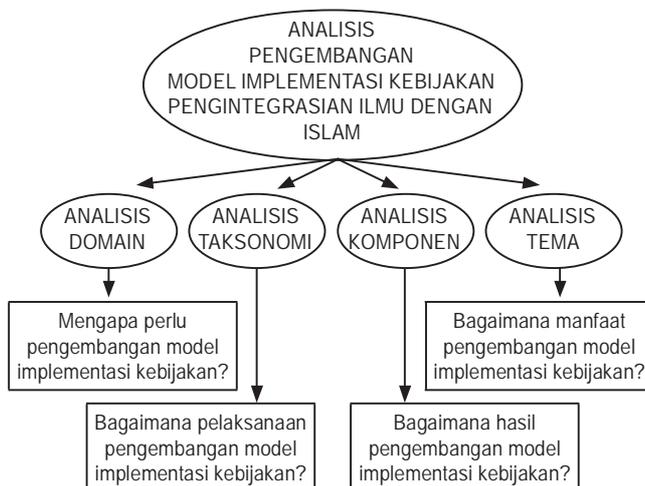
Observasi dan dokumentasi dilakukan untuk mendapatkan dan penilaian data berupa pengembangan kurikulum, sillabus, SAP, karya ilmiah, skripsi, serta berbagai bentuk bukti fisik kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islam di tingkat fakultas.

Maka instrumen atau alat penelitian adalah orang yakni peneliti sendiri serta fokus group atau *human*

instrument (dosen pengampu matakuliah) melalui uji coba model.

Teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Spradly yang terdiri dari Analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Komponen dan Analisis Tema.

Gambar 1. Analisis Data Kualitatif Spradley



Analisis Hasil Temuan

Analisis data hasil temuan penelitian membahas masalah kebijakan (*policy*) pengembangan ilmu berparadigma Islami dalam deskripsi mata kuliah di tingkat fakultas. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa teknik analisis data penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif Spradley sebagai berikut: Analisis Domain, Analisis Taksonomi, Analisis Komponen, dan Analisis Tema.

Berikut ini analisis data hasil temuan dengan menggunakan matrik analisis Spradley.

Tabel 1: Matrik Analisis Data Hasil Temuan di FTK

No	Data Temuan	Analisis Domain (Mengapa Perlu)	Analisis Taksonomi (Bagaimana Pelaksanaan)	Analisis Komponen (Bagaimana Hasil)	Analisis Tema (Model)
1	Visi: Menjadikan FTK sebagai lembaga pendidikan utama di kawasan Asia Tenggara pada tahun 2013 dalam memajukan, mengembangkan, menerapkan dan menciptakan sumberdaya pendidik yang berkualitas keilmuan, keislaman serta mampu mengintegrasikan sains dan agama dalam pendidikan.	Karena visi UIN sendiri menetapkan visi pengintegrasian ilmu dengan Islam	Misi: Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat yang berbasis mutu dalam keilmuan dan keislaman.	Dibukanya Fakultas/Prodi Umum dan Keislaman Terdapat 4 prodi umum dan 4 prodi keagamaan di FTK	Model= Top Down Bottom Up Hybrid

2	Tujuan FTK: Menghasilkan sarjana Kependidikan dan Keguruan yang berwawasan keislaman, memiliki kemampuan akademik, paedagogik, dan berdisiplin tinggi, bertanggung jawab secara moral, sosial dan keagamaan, dengan pendekatan keterpaduan sains, teknologi dan agama.	Karena tuntutan misi yang memerlukan kejelasan tujuan	Melakukan perkuliahan dengan 152 sistem kredit semester, Adanya matakuliah keislaman di samping umum; Peng-integrasian dalam kurikulum, silabus, dan deskripsi matakuliah	Telah meng-hasilkan ribuan sarjana pendidik dan tenaga kependidikan	Top down
3	Pimpinan dan Karyawan	Karena kebutuhan SDM dan peraturan/- Undang-undang	Diangkat dengan SK Rektor	Secara umum memiliki kompetensi profesional, manajerial, dan keagamaan	Top down
4	. Tenaga Pengajar	Karena kebutuhan SDM dan peraturan/- Undang-undang	Terdapat 186 dosen: 105 kualifikasi akademik UIN/ IAIN/STAIN, 81 lulusan Universitas/PT umum	Secara umum memiliki kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian (Muslim), dan sosial	Top down
5	Kurikulum yang digunakan, pelaksanaannya memakai Sistem Satuan Semester. a. Kurikulum yang Berorientasi pada Kompetensi b. Pengalaman Belajar Mengajar Kurikulum inti dan institusional terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.	Keputusan Menteri Agama RI No. 122 Tahun 1988, Struktur Program dikelompok ke dalam kurikulum inti, nasional, dan institusional	Kegiatan Studi terdiri dari: 1. Tatap Muka 2. Kegiatan Terstruktur 3. Kegiatan Mandiri	Secara umum memiliki kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian (Muslim), dan sosial	Top down
6	Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, ujian pemberian tugas, penulisan karangan, praktikum, UTS, UAS, munaqasah dan, sebagainya.	Peraturan Akademik	Khusus munaqasah diuji kompetensi keislaman di prodi umum	Sarjana Muslim yang memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor	Top down
7	Monitoring/Evaluasi dilakukan pada; 1. Pelaksanaan SAP dosen, 2. Tugas-tugas Penasehat Akademis (PA), 3. frekwensi perkuliahan (tatap muka, ujian, dan lain-lain), serta 4. masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan pelaksanaan sistem SKS.	Peraturan Akademik	Monitoring dilakukan oleh pimpinan FTK sedangkan evaluasi dan penembangan mutu dilimpahkan ke KPM atau BPPM	Adanya hasil audit dosen teladan selalu dari FTK, sarjana pemuncak, serta banyaknya calon mahasiswa/ minat masyarakat	Top down

8	Setiap semester dekan mengintruksikan kepada semua dosen dan asisten dosen agar membuat atau memperbaharui Silabus Matakuliah yang diampu dan menyerahkan ke ketua prodi masing-masing. Namun tidak ada intruksi pengintegrasian ilmu dengan Islam dalam surat tersebut.	Sebagai contoh surat dekan nomor: Un.04/F.11/ PP.00.9/1 1647/2011 tertanggal 18 Agustus 2011	Hampir semua dosen menyusun silabus dan SAP dan disyaratkan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat dan penilaian kinerja dosen	Maka dengan mudah ditemui di setiap prodi kumpulan silabus dan SAP matakuliah yang dibuat dosen atau asisten dosen..	Top down
9	Pada tahun 2008 diadakan seminar pengintegrasian ilmu dengan Islam dalam rangka sosialisasi misi konversi IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau.	Inisiatif Pimpinan FTK	Seminar yang dihadiri hampir seluruh dosen FTK, diawasi masih ada dosen yang keberatan dengan konversi ke UIN ini..	Peserta setuju pengintegrasian ilmu dengan Islam ini. Namun masih ada yang keberatan perubahan jadi UIN. Belum ada tindak lanjut seminar	Top down
10	Pada tahun 2010 FTK melakukan kegiatan workshop penyusunan deskripsi matakuliah yang terintegrasi antara ilmu dengan Islam..	berdasarkan DIPA 2010: UUSPN no. 20 tahun 2003 Pasal 60 jo Pasal 72 UU nomor 14 2005, tentang kewajiban dosen. Workshop penyusunan deskripsi mata kuliah	100 (seratus) dosen berpartisipasi aktif pada hari kamis tanggal 9 Desember 2010 bertempat di Auditorium lantai 5 rektorat UIN Susqa, disediakan komsumsi, piagam, dan uang transportasi	60% deskripsi matakuliah FTK sudah terintegrasi	Bottom up
11	Buku Daras	Intruksi Dekan/PD 1	Dikumpulkan untuk penilaian kinerja/DP3 Dosen, dan akreditasi	Terdapat 47 buku referensi/ tulisan dosen di almari depan lobi anorFTK	Bottom up
	Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa berupa lembaga dakwah kampus dipandang menunjang pengintegrasian kampus	Sesuai dengan kebijakan UIN Suska	LDK Nuri LDK Eins Syam	Ada halaqoh rutin mingguan dan Insidentil	bottom up

Tabel 2: Matrik Analisis Data Hasil Temuan di Fekonos

No	Data Temuan	Analisis Domain (Mengapa Perlu)	Analisis Taksonomi (Bagaimana Pelaksanaan)	Analisis Komponen (Bagaimana Hasil)	Analisis Tema (Model)
1	Visi: Visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial diselaraskan dengan visi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun visi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial adalah mewujudkan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial sebagai lembaga pendidikan ekonomi dan sosial yang mengembangkan ajaran Islam, ilmu pengetahuan, teknologi dan seni secara integral di kawasan Asia Tenggara tahun 2013.	Karena visi UIN sendiri menetapkan visi peng-integrasian ilmu dengan Islam	Misi: Melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian dan pengabdian masyarakat dengan menggunakan paradigma Islami, serta Menyiapkan SDM, sarana dan prasarana penunjang pelaksanaan Tri Dharma PT.	Dibukanya Fakultas/Prodi Umum dan Keislaman Terdapat 3 jurusan dan 2 prodi umum di Fekonos	Model= Top Down

2	Karakteristik Fekonsos Pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi berparadigma Islami dengan penekanan iman dan tauhid.	Pengembangan karakteristik UIN Suska Riau	Penyelenggaraan beberapa disiplin ilmu ekonomi mencapai standar kompetensi keislaman memperkuat domain akidah, ibadah, akhlak, dan muamallah Islamiah, sebagai upaya nyata mewujudkan integrasi ilmu dengan Islam.	Nuansa lingkungan kampus yang madani sesuai dengan nilai-nilai Islam dan Tamaddun Melayu. Adanya pengumuman agar berperilaku Islami di setiap pintu kantor/ruang kuliah	Top down
4	Tujuan Fekonsos: Dirinci setiap jurusan dan Prodi: Menghasilkan sarjana/ ahli madya (MEN, MEP, AKN, AND) muslim yang memiliki akhlak al-karimah, memiliki kompetensi akademik yang handal dan profesionalis yang tinggi, serta kompetensi keislaman secara integrative, berdisiplin, penelitian dan pengkajian, pengabdian kepada masyarakat, menuju lingkungan dan masyarakat yang madani.	Karena tuntutan misi yang memerlukan kejelasan tujuan	Melakukan perkuliahan dengan 154 SKS, Adanya matakuliah keislaman di samping umum; Peng-integrasian dalam kurikulum, silabus, dan deskripsi matakuliah	Telah menghasilkan raturan sarjana ekonomi. pendidik	Top down
5	Pimpinan dan Karyawan	Karena kebutuhan SDM dan peraturan/ Undang-undang	Diangkat dengan SK Rektor	Secara umum memiliki kompetensi profesional, manajerial, dan keagamaan	Top down
6	. Tenaga Pengajar	Karena kebutuhan SDM dan peraturan/ Undang-undang	Terdapat 25 dosen tetap, 1 dosen mitra, 12 12 dosen kontrak, 91 dosen luar biasa, 23 Cados, umumnya dari PT umum	Secara umum memiliki kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian Muslim, dan sosial	Top down
7	Kurikulum yang digunakan, pelaksanaannya memakai Sistem Satuan Semester. a. Kurikulum yang Berorientasi pada Kompetensi b. Pengalaman Belajar Mengajar Kurikulum inti dan institusional terdiri atas kelompok MPK, MKK, MKB, MPB, dan MBB.	Keputusan Menteri Agama RI No. 122 Tahun 1988, Struktur Program dikelompok ke dalam kurikulum inti, nasional, dan institusional	Kegiatan Studi terdiri dari: 1. Tatap Muka 2. Kegiatan Terstruktur 3. Kegiatan Mandiri	Secara umum memiliki kompetensi profesional, paedagogik, kepribadian (Muslim), dan sosial	Top down
8	Evaluasi dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti ujian tertulis, ujian lisan, ujian dalam bentuk seminar, ujian pemberian tugas, penulisan karangan, praktikum, UTS, UAS, munaqasah dan, sebagainya.	Peraturan Akademik	Khusus munaqasah diuji kompetensi keislaman di prodi umum; Acuan teoretik skripsi wajib ada prinsip Islam	Sarjana Muslim yang memiliki kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor	Top down
9	Monitoring/Evaluasi dilakukan pada; 1. Pelaksanaan SAP dosen, 2. Tugas-tugas Penasehat Akademis (PA), 3. frekwensi perkuliahan (tatap muka, ujian, dan lain-lain), serta 4. masukan dari semua pihak untuk penyempurnaan pelaksanaan sistem SKS.	Peraturan Akademik	Monitoring dilakukan oleh pimpinan Fekonsos sedangkan evaluasi dan penembangan mutu dilimpahkan ke KPM atau BPPM	Adanya hasil audit BPPM (internal) bahwa Fekonsos telah melakukan perkuliahan dengan baik	Top down
10	Setiap semester dekan mengintruksikan kepada semua dosen dan asisten dosen agar membuat atau memperbaharui Silabus Matakuliah yang diampu dan menyerahkan ke ketua prodi masing-masing. Namun tidak ada intruksi pengintegrasian ilmu dengan Islam dalam surat tersebut.	Peraturan Akademik	Hampir semua dosen menyusun silabus dan SAP dan disyaratkan untuk kelengkapan administrasi kenaikan pangkat dan penilaian kinerja dosen, serta keperluan akreditasi	Dapat ditemui di setiap jurusan/prodi kumpulan silabus dan SAP matakuliah yang dibuat dosen atau asisten dosen..	Top down
11	Pada bulan juli 2011 Dekan Fekonsos mengintruksikan penyusunan/up-date silabus dan SAP dalam rangka pengintegrasian ilmu dengan Islam pencapaian visi dan misi konversi IAIN Susqa Pekanbaru menjadi UIN Suska Riau.	Intruksi Pimpinan Fekonsos dan Peneliti	23 dosen mengambil panduan dan format silabus/SAP terintegrasi.	9 orang dosen menyusun silabus dan SAP terintegrasi, 4 Silabus terintegrasi, 6 SAP terintegrasi, dan 3 masih belum terintegrasi	Top down
12	Pada tahun 2009 Fekonsos telah melakukan review kurikulum dan kita meminta dosen menyusun kurikulum terintegrasi tersebut	Inisiatif Dekan	Workshop review kurikulum fekonsos	Kurikulum Fekonsos UIN Suska 2009 (dalam buku panduan akademik)	Top down Bottom up
13	Buku Daras	Inisiatif Dosen	Ada seorang dosen yang memulai menyusun buku daras terintegrasi	Belum selesai	Bottom up

Pengujian Model

Berdasarkan analisis domain, taksonomi, komponen, dan tema, maka pada bagian ini dianalisis temuan penelitian dengan pengujian model secara kualitatif diukur model teoretik. Secara sederhana analisis pengujian model terfokus pada tiga model implementasi kebijakan, yakni model top-down,

bottom up, dan hybrid dengan mendisplay data serta fakta temuan menurut matrik berikut.

Tabel 3: Matrik Analisis Pengujian Model

No	Hasil Temuan	Kesimpulan Teoretik
1	Adanya muatan pengembangan ilmu berparadigma Islami dalam Visi, Misi, Karakteristik, dan Tujuan Pendidikan kedua fakultas.	Pearce dan Robinson mengemukakan; perlu kesamaan visi dan misi dalam manajemen strategis (topdown), baik ditingkat universitas, maupun di level fakultas/prodi. Artinya
2	Dalam buku panduan akademik kedua fakultas dijumpai matakuliah keislaman (institusional/universitas) dan ada mata kuliah keahlian (Fakultas/prodi) meskipun berbeda porsi sksnya. Pengintegrasian dalam kurikulum, sillabus, dan deskripsi matakuliah	Pengintegrasian dalam kurikulum didasarkan atas kehendak Peraturan akademik UIN (Top down) (van Meter dan van Horn)
3	Adanya tenaga pendidik dan kependidikan dengan latarbelakang pendidikan umum dan keislaman	Irfan: Pelayanan publik mesti dilakukan secara integral sesuai dengan teori implementasi kebijakan publik (top down) (Sabatier&Mazmanian)
4	Evaluasi kompetensi keislaman diuji dalam munaqasah di prodi umum, serta keharusan memuat ayat al-Quran/hadis/prinsip Islami sebagai acuan teoretik skripsi di prodi umum	Merupakan model bottom up di tingkat fakultas, sesuai dengan teori (teori Y dan X McGregor)
5	Monitoring dilakukan oleh pimpinan FTK sedangkan evaluasi dan penembangan mutu dilimpahkan ke KPM atau BPPM	Wildavsky cs: (hybrid) menuntut adanya sinergi kebijakan ke atas, ke bawah, dan ke samping.
6	Silabus dan SAP dosen dikumpulkan untuk penilaian kinerja/DP3, umumnya belum terintegrasi. Tetapi setelah adanya juklak penelitian para dosen mulai melakukan pengintegrasian.	Model hybrid menuntut adanya juklak/SOP dalam pengembangan model implementasi kebijakan (Wildavsky dan Browne)
7	Adanya seminar/workshop pengintegrasian ilmu di kedua fakultas	Sosialisasi kebijakan sangat diperlukan dalam implementasi sebuah kebijakan (top down) (Riant)
8	Kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa berupa lembaga dakwah kampus dipandang menunjang pengintegrasian.	Sesuai dengan kebijakan UIN (bottom up)
9	Buku dasa/karya ilmiah dosen dikumpulkan untuk penilaian kinerja/DP3 Dosen, dan akreditasi	Evaluasi kebijakan di unit pelaksana (fakultas/prodi) (hybrid)
Berdasarkan data dan fakta di lapangan, implementasi kebijakan pengintegrasian ilmu atau pengembangan ilmu berparadigma Islami belum optimal. Dari analisis di atas diperoleh model implementasi top down model, bottom up model, dan hybrid model. Berdasarkan data dan fakta di lapangan masih banyak berlaku model top down. Sedangkan menurut teori apabila model top down dan bottom up telah dilakukan namun hasilnya belum efektif dan efisien, maka sebaiknya dilakukan model implementasi hybrid.		

Kesimpulan

Dari paparan bab terdahulu tentang pembahasan hasil temuan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Model Implementasi kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami sesuai dengan visi, misi, karakteristik, dan tujuan konversi IAIN Susqa Pekanbaru ke UIN Suska Riau dalam bentuk pengintegrasian ilmu dengan Islam belun terencana dengan baik.
2. Para dosen sebagai pelaksana kebijakan dalam perkuliahan pada umumnya belum menerima juklak dan juknis pengintegrasian ilmu ke dalam mata kuliah.
3. Hasil pengintegrasian ilmu dengan Islam dalam matakuliah belum optimal dan maksimal.
4. Model implementasi kebijakan pengembangan ilmu berparadigma Islami dalam bentuk pengintegrasian ilmu dengan Islam di UIN Suska Riau didominasi oleh model top down.
5. Model yang efektif dan efisien untuk pengembangan model implementasi kebijakan secara empirik maupun teoretik di UIN Suska adalah model hybrid.

Catatan: (Endnotes)

- 1 Dr. Amri Darwis, M.Ag. adalah Dosen Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan UIN SUSKA Riau.

Daftar Pustaka

- Abdul Wahab. (1997). *Analisis Kebijaksanaan dan Formulasi ke Implementasi Kebijaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Al-Asad, Nassaruddin. (1994). "Integration of Knowledge between Religious and worldly Sciences". *Journal Horizon of Islam*. First Year, March 1994. Amman.
- Al-Faruqi, Ismail Raji. (1982). *Islamization of Knowledge: General Principles and Workplan*. Washington D.C.: International Institute of Islamic Thought.
- Amir lutfi. (2005). *Memori Perubahan IAIN menjadi UIN Suska Riau*. Pekanbaru: Biro AUAK UIN Suska Riau.
- Anderson, James B. (1979). *Public Policy Making*. New York: Holt Rinehart and Winston.

- Lexy J. Moleong. (2004). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Linebery, Robert L. (1978). *American Public Policy*. New York: Harpen Z. Row.
- M. Irfan. Islamy. (1997). *Prinsip-prinsip Perumusan Kebiaksanaan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- M. Nazir. (ed.). (2004). *Profil UIN Suska Riau 2004*. Pekanbaru: Suska Press.
- (2007). Laporan Rektor pada Rapat Senat Terbuka Milad II dan Wisuda Program Diploma III, Sarjana (S1) dan Program Magister (S2) UIN Suska Riau hari Senin tanggal 26 Februari 2007.
- Matland, Richard E. (1995). "Syntesizing the Implementation". *Journal of Public Administration Research and Theory*. 5: 2.
- Parsons, Wayne. (1997). *Public Policy: An Introduction to the Theory and Practice of Policy Analysis*. Edward Elgar, Cheltenham, UK Lyme, US.
- Statuta UIN Suska*. BAB III Pasal 6 dan 7.
- Suharsimi Arikunto. (1998). *Evaluasi Program*. Yogyakarta: IKIP Yogyakarta.
- Wahab. (1999). *Analisis Kebijakan Publik Teori dan Aplikasinya*. Malang: PT Danar Wijaya.